PERANAN LURAH DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN KARYA BARU KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR PALEMBANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Dalam Mencapai Derajat Strata SI

Ilmu Sosiologi

Disusun Oleh :

Desma Yulindra

07081002084

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2013

S
352.307
Des
P
2013

Record : 25245
Reg : 25806

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

PERANAN LURAH DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN KARYA BARU KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR PALEMBANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Dalam Mencapai Derajat Strata SI

Ilmu Sosiologi

Disusun Oleh :

Desma Yulindra

07081002084

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2013

LEMBAR PENGESAHAN

PERANAN LURAH DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PBB (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN) DI KELURAHAN KARYA BARU KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR PALEMBANG

SKRIPSI

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk mengikuti ujian komprehensif dalam memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-1 Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh :

DESMA YULINDRA

Disetujui pada tanggal 8 maret 2013

Pembimbing I

Dr. ZULFIKRI SULEMAN, MA
NIP. 195907201985031002

Pembimbing II

MERY YANTI, S, Sos, MA
NIP. 197705042000112200l

PERANAN LURAH DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PBB (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN) DI KELURAHAN KARYA BARU KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR PALEMBANG

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
Dan Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Dari Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosiologi

Pada Tanggal 21 Maret 2013

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Dr. Zulfikri Suleman, MA.
Ketua _____

Mery Yanti, S. Sos, MA.
Anggota _____

Dr. Dadang Hikmah Purnama, M. Hum.
Anggota _____

Faisal Nomaini, S.Sos M. Si.
Anggota _____

Indralaya, April 2013
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan

Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si
NIP.196010021992032001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Raih impianmu, bahkan jika dia terlalu jauh dari jangkauanmu. Kamu tak pernah tahu seberapa jauh kamu melangkah hingga kamu mencobanya. (Desma Yulindra)

Setiap jiwa adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya, menentukan arah, mengarahkan target, dan merubah hasil terletak pada diri sendiri bukan orang lain berpikir mau dibawa kemana hidup ini dan akan kemana setelah hidup ini, harus seperti apa hidup ini dan akan kemana setelah hidup ini. "Penentuan Hasil Terletak Pada Pilihan"

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA:

1. Papa dan Mama yang selalu memberikan support.
2. Sahabat serta teman-teman terdekatku yang selalu setia menemaniku Afni, Oci, Warda, Iccy, Lydia, The Crazy Fruits.
3. Saudaraku Apriansyah.
4. My Someone.
5. AN 09 dan Sos, 08, 09 dan 010.
6. Almamaterku yang selalu kubanggakan.

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR 131047
TANGGAL 25 APR 2013

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL x
DAFTAR BAGAN xi
ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 8
a. Manfaat Teoritis 8
b. Manfaat Praktis 8
1.5 Tinjauan Pustaka 8
1.6 Kerangka Pemikiran 11
1.7 Metode Penelitian 25
1.7.1 Sifat dan Jenis Penelitian 25
1.7.2 Lokasi Penelitian 26
1.7.3 Batasan Konsep 27
1.7.4 Unit Analisis Data 29
1.7.5 Penentuan Informan 30
1.7.6 Data dan Sumber Data 30
a. Data Primer 30
b. Data Sekunder..... 30

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data 31
a. Wawancara Mendalam 31
b. Observasi Terfokus..... 32
c. Dokumentasi 32
1.7.8 Teknik Analisa Data 32
1.7.9 Teknik Triangulasi Data 34

BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitan
2.1.1 Kondisi Geografis dan Keadaan Alam 35
2.1.2 Kondisi Demografi 35
2.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 36
2.1.4 Pendidikan dan Agama 37
2.1.5 Kesehatan 39
2.2 Susunan organisasi dan Tata Kerja Kelurahan 41
2.3 Pembinaan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) Kelurahan Karya Baru 46
2.3.1 Pembinaan Aparat Keluraha..... 46
2.3.2 Pembinaan Tertib Administrasi 47
2.3.3 Koordinasi Tingkat Kelurahan 48
2.3.4 Pelaksanaan 5 K 49
2.3.5 Menggerakkan 10 Program Pokok PKK 51
2.3.6 Meningkatkan Kesehatan Masyarakat 52
2.3.7 Pembinaan Ekonomi Masyarakat 53
2.3.8 Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga 53
2.3.9 Pengembangan Keluarga Berencana 54
2.4 Penguasaan Dan Potensi Wilayah 56
2.4.1 Potensi Wilayah 56
2.5 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Program PBB..... 56
2.6 Deskripsi Informan Penelitian 57

BAB III ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

3.1 Peranan Lurah dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Program PBB 62

3.1.1 Peranan Lurah dalam Pembinaan RT dan RW 77

3.1.2 Peran Keseharian Lurah dalam Masyarakat 78

3.1.3 Pandangan Masyarakat Pada Peranan Lurah dalam Program PBB..... 80

3.1.4 Partisipasi Masyarakat dalam Program PBB 82

3.1.5 Manfaat yang didapat dalam Membayar PBB 89

3.2 Kendala yang dihadapi Lurah dalam Program PBB 92

BAB IV PENUTUP

4.1.1 Kesimpulan 98

4.1.2 Saran 99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulilahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat hidayah, ridho dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Peranan Lurah dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Pada Program PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang**" sebagai persyaratan dalam mencapai derajat Pendidikan Strata I Sosiologi.

Penulisan skripsi ini ternyata tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan dukungan moril maupun materil, serta motivasi dalam bentuk semangat dari berbagai pihak. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Badia Parizade, M.B.A selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Dra. Dyah Hapsari, ENH, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA., selaku ketua Jurusan Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, memeriksa, saran, nasehat dan pengarahan serta bantuan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal penulisan hingga akhir penyusunan.

4. Ibu Merry Yanti, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosiologi FSIP Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa, memberikan bimbingan, saran, nasehat dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Sulaiman Mansyur,.LC,.M.Hum,. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat, dukungan dan pendampingan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. Seluruh dosen dan karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan di kampus FISIP Universitas Sriwijaya. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan tidak terhingga kepada bapak dan ibu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta Papa dan Mama terima kasih telah memberikan support, semangat, motivasi, nasehat, bantuan moril dan materil dengan kasih sayang dan do'a yang tiada henti. Terima kasih papa dan mama yang telah menjadi sandaran hidupku, semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan kebahagiaan untuk kalian. Amin.
8. Sahabat-sahabat dan kerabat terdekatku, Afni, Oci, Warda, Iccy, Lydia, Iras, The Crazy Fruit. Semoga ikatan kekerabatan tetap terjaga. Teman-teman seperjuanganku Putri, Tika, Okto, Tomi, Ges, terima kasih atas bantuan, dan kerjasama selama ini. Tetaplah menjadi menjadi diri sendiri, be your self and be smart.

9. Uul, Olga, Ucha, Nanda, Risa, Metha, Lidya, Anggi (AN 09) yang unyu-unyu dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu keep spirit, smile ladies semoga cepat menyusul.
10. Mahasiswa Sosiologi angkatan 2008 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas kerja samanya selama ini.
11. Para informan (Lurah dan staf Kelurahan Karya Baru, masyarakat sekitar Kelurahan Karya Baru) terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk partisipasinya dalam wawancara maupun telah bersedia memberikan izin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil yang terbaik, namun penulis menyadari keterbatasan pengetahuan, kemampuan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini.

Kiranya segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan pahala, kebaikan dan limpahan kasih sayang dari Allah S.W.T. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin ya Robbal A'lamin.*

Indralaya, 13 Maret 2013

Penulis

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kelurahan Karya Baru Menurut Jenis Pekerjaan 38
Tabel 2 Jumlah Prasarana Pendidikan di Kelurahan Karya Baru..... 40
Tabel 3 Keadaan Penduduk di Kelurahan Karya Baru 40
Tabel 4 Sarana Peribadatan di Kelurahan Karya Baru 41
Tabel 5 Sarana Kesehatan Kelurahan Karya Baru 42
Tabel 6 Stuktur Organisasi Kelurahan Karya Baru 46
Tabel 7 Daftar Ketua RW Kelurahan Karya Baru 44
Tabel 8 Daftar Nama Ketua RT Kelurahan Karya Baru 44
Tabel 9 Tabel Pengembangan Keluarga Berencana 54
Tabel 9 Profil Informan Inti 65
Tabel 10 Profil Informan Pendukung 65

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan Kerangka Pemikiran 24

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Peranan Lurah dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Program PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang**". Penelitian ini mengkaji permasalahan dalam program PBB yang di alami oleh Lurah. Tujuan penelitian ini mengetahui peran Lurah dalam mendorong partisipasi serta keikutsertaan masyarakat dalam program PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). serta mengetahui kendala yang dialami oleh lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang menggambarkan data deskriptif dari fenomena yang diteliti dengan unit analisis adalah pada tataran individu, yaitu Lurah, staf Kelurahan yang melayani masyarakat pada program PBB. Dalam penentuan informan digunakan purposive dengan teknik informan (key informan) yang tujuannya untuk mendapatkan informasi yang lebih detail sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi terfokus, metode wawancara, dan dokumentasi. Analisis menggunakan alur analisis Miles dan Habermas yang terdiri dari reduksi data, penyajian, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Lurah di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar telah berperan aktif, akan tetapi keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam program PBB sehingga menjadikan informasi yang dilakukan lurah diabaikan oleh objek pajak. Keterlibatan lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam program PBB dapat dilihat dari peranan yang telah dilakukan lurah.

Kata Kunci : Peranan Lurah, Partisipasi Masyarakat, Program PBB

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
UNIVERSITAS SINI
UPT
PERPUSTA

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Peranan Lurah sangat penting sekali di suatu wilayah, khususnya bagi masyarakat. Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Kelurahan merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kelurahan dituntut untuk menunjukkan kemampuan manajerialnya terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Lurah dituntut untuk profesional dan menguasai secara baik pekerjaannya melebihi rata-rata pegawai yang ada, serta memiliki komitmen moral yang tinggi atas pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesinya sebagai pemimpin. Lurah merupakan subjek yang harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui tuntutan dan anjuran kepada masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan. .

Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2001 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 BAB IV tentang kelurahan, yaitu bagian pertama : Kedudukan Tupoksi ; pasal 7 disebutkan bahwa :

1. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan
2. Kelurahan dipimpin lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui camat.

Selanjutnya pasal 8 disebutkan bahwa tugas pokok Kelurahan adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukkan organisasi dan tata kerja dan Kelurahan, dilanjutkan dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 31 Tahun 2008 tentang pelaksanaan pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan. Dijelaskan bahwa Lurah adalah Kepala Kelurahan di jajaran Pemerintah Kota Palembang. Sebagai perangkat Daerah maka :

1. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan.
2. Kelurahan dipimpin oleh Lurah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Selanjutnya Tugas Pokok Kelurahan adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota.

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam

mengurusi rumah tangga kelurahannya, sehingga bisa mandiri. Selain sebagai pelaksana dan perencana program pembangunan, maka para aparatur pemerintah kelurahan juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Pada dasarnya program pemerintah seperti program pembangunan sangat memerlukan kontribusi dari masyarakat, karena keberhasilan program pembangunan ini tergantung dari tingkat partisipasi masyarakat, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka, semakin tinggi tingkat keberhasilannya, begitupun sebaliknya. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan dari program pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan wujud dari terciptanya kemauan masyarakat dalam suatu program pemerintah khususnya program pembangunan bagi masyarakat. Salah satu wujud kemauan itu dengan adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan program pemerintah yang ditujukan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

Partisipasi masyarakat difungsikan sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah program pemerintah. Menurut Nasution (2009:42) bahwa keberhasilan penyelengaraan otonomi daerah dan desa juga tidak terlepas dari adanya peran serta atau partisipasi aktif anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah/desa, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi ditunjuk guna mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah atau desa yang bersangkutan. Oleh sebab itu tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di

daerah atau di desa tidak saja ditangan kepala daerah atau kepala desa tetapi juga di tangan masyarakat tersebut.[1]

Perubahan secara global telah memacu persaingan yang semakin tajam di berbagai sektor, baik ditingkat nasional maupun tindakan daerah. Kondisi ini tidak dapat dihindarkan, oleh karena birokrasi pemerintah perlu melakukan perbaikan serta mencari alternatif baru guna merubah pandangan masyarakat yang selama ini menganggap bahwa birokrasi pemerintah telalu lamban dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah didalam memenuhi keinginan atau kebutuhannya semakin kuat, hal ini tentunya harus dilakukan melalui manajemen dan administrasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, termasuk didalamnya adalah Pemerintah Kelurahan Karya Baru.

Kelurahan Karya Baru merupakan salah satu dari empat kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang juga merupakan pemekaran dari wilayah Kecamatan Sukarame Kota Palembang yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Dr. H. Mahyuddin, Sp. OG, pada tahun 2007. Mayoritas penduduk Kelurahan Karya Baru adalah masyarakat asli Komering, Sekayu dan Jawa. Kawasan Kelurahan Karya Baru merupakan Kelurahan yang di apit oleh sektor industri tidak mengherankan jika sebagian besar penduduknya merupakan pegawai swasta yang bekerja di pabrik indomie dan interbis.

---

[1] http://www.sacafirmansyah.wordpres.com diakses pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 20.08 wib

Namun terlepas dari itu masyarakat Kelurahan Karya Baru juga memiliki permasalahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kota Palembang dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kelurahan Karya Baru telah melakukan berbagai cara dan upaya agar wajib pajak membayar pajak mereka tepat waktu.

Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2011 terjadi peningkatan nominal yang cukup besar semestinya dua milyar akan tetapi menjadi lebih dari dua milyar. Berikut dapat dilihat realisasi penerimaan dari pajak PBB di Kelurahan Karya Baru selama Tahun 2011, sebagai berikut :

- Jumlah SPPT PBB Tahun 2011 sebanyak : 5.037 lembar
- Target nominal ketetapan sebesar : Rp. 2. 125. 384. 249,-

  Realisasi PBB sampai dengan bulan September tahun 2011
- Realisasi jumlah SPPT adalah sebanyak : 3.876 lembar
- Realisasi nominal sebesar : Rp. 1.601.476.212,-
- Persentase pencapaian target sampai dengan bulan oktober adalah 73,35%

Jumlah ketetapan dari dinas pendapatan daerah (DISPENDA) Kota Palembang Kecamatan Alang-Alang Lebar Rp. 3,379,420,467 sedangkan dari empat Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Alang-Alang Lebar, Talang Kelapa, Karya Baru, dan Srijaya, Kelurahan Karya Baru lebih besar nominalnya berjumlah Rp.1,826,449,107. Kondisi ini menjadikan target PBB wilayah Kelurahan Karya Baru lebih besar bila dibandingkan dengan target untuk wilayah se-Kecamatan, misalnya target se-Kecamatan Seberang Ulu dua, Plaju, Gandus, Kertapati, dan Sematang Borang. Selain itu itu SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB Kelurahan Karya Baru banyak terdapat data PBB ganda. Namun

sampai saat ini juga belum diperbaiki sehingga data tersebut masih diterbitkan pada tahun 2011. Timbulnya data PBB ganda ini diakibatkan banyak faktor penyebab seperti masalah sengketa tanah. Pada Sengketa tanah ni masing-masing yang bersengketa menerbitkan SPPT PBB pada objek pajak yang sama dan parahnya lagi mereka tidak membayar. Selanjutnya data ganda yang diakibatkan oleh pemecahan PBB, induknya masih terbit dan pecahannya juga terbit. Namun demikian hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Kelurahan Karya Baru untuk melaksanakan penagihan untuk memenuhi pencapaian target PBB, walaupun dimaklumi persentase pencapaian akan lebih rendah akibat data ganda tersebut.[2]

Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana peranan lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat pada program PBB secara natural dan mendekati kenyataan dengan pendekatan sosiologis. Hal ini dikarenakan lurah sebagai pemimpin yang dihormati dan diharapkan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Berdasarkan gejala-gejala yang muncul, adanya suatu ketertarikan untuk mengangkat hal ini menjadi suatu permasalahan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul "**Peranan Lurah dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Pada Program PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang**".

[2] Laporan Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar 2011

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena sosial yang muncul di Kelurahan Karya Baru, terdapat permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu untuk mendapat pemahaman yang lebih maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam program PBB di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang ?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PBB di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang ?

1. 3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam program PBB di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar

Sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bentuk Peran Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam program PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang.
2. Mengetahui kendala yang dialami oleh lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang.

1. 4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis adalah :

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bidang sosial khususnya Sosiologi Organisasi dalam program PBB di Kelurahan.

b. Manfaat secara praktis adalah :

Data hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi pemerintah dalam hal pengembangan pembangunan program PBB daerah terutama bagi masyarakat Kelurahan khususnya di bidang organisasi yang lebih baik lagi.

1. 5. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Peranan Lurah/Desa sebelumnya telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan masyarakat yang berlainan dan perspektif yang berbeda. Adapun beberapa penelitian mengenai Peranan Lurah/Desa diantaranya adalah :

Penelitian tentang Kepemimpinan dalam masyarakat yang mengambil Idianto tahun (1990) "Pengaruh Persepsi tentang Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik". Penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata ada pengaruh persepsi tentang Kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarakan yang telah peneliti lakukan mendapatkan jawaban yang menunjukkan hubungan atau pengaruh persepsi tentang Kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi

masyarakat dalam pembangunan fisik adalah tinggi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang Kepemimpinan Kepala Desa dapat dinyatakan baik (positif), dengan kata lain adalah tinggi (78,06 %) sedangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik sudah baik atau tinggi, hal ini terlihat dari ke-enam indikator yang semuanya berkategori tinggi (82 %).

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Dhiassari Paminta Resti (2007) yang berjudul "Peranan Tokoh Pemimpin Masyarakat dalam Pembangunan Daerah Pedesaan di Desa Mendolo Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah" Dalam mensukseskan program pembangunan di daerah pedesaan, peran kepala desa/lurah sangatlah besar. Karena kepala desa berperan sebagai motifator, dinamisator dan modernisator bagi warga masyarakat. Seorang kepala desa juga harus mampu menyelesakan masalah-masalah yang ada di lingkungannya. Di desa Mendolo, kepala desa memang telah berperan sangat besar dalam pembangunan fisik masyarakat desanya. Mulai dari terlaksananya program perbaikan dan pengaspalan jalan, pembangunan panel-panel tenaga surya dan pembangunan MCK (mandi, cuci, kakus). Selain itu kepala desa juga berperan menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan masyarkat. Kepala desa Mendolo bisa dikatakan telah tanggap dengan apa yang diperlukan masyarakat, misalnya masalah akses jalan. Akses jalan tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama peningkatan ekonomi diperlukan kelancaran sarana transportasi.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Tun Susdiyanti (2008) yang berjudul " Peranan Lurah dalam Pelestarian Lingkungan Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Sareal Kota Bogor". Penelitian ini menjelaskan bahwa pada prinsipnya masyarakat kelurahan Kayu Manis melakukan pengelolaan antara pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan tujuan pokok pembangunan yaitu meningkatkan dan kemakmuran dan kesejahteraan anggota masyarakat yang bersangkutan. Peran serta masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan merupakan warisan sosial yang telah lama ada, secara individual, masing-masing keluarga melakukan penataan lingkungan sendiri berdasarkan kebutuhan. Keberhasilan Kelurahan Kayu Manis dalam pelestarian lingkungan tidak terlepas dari peran lurah sebagai motivator, adanya pemberian reward dan dengan melakukan pendekatan terhadap warga melalui aparat desa dan pemimpin informal yang ada untuk bersama-sama melakukan program pelestarian lingkungan.

Berbeda dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana peranan lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat pada program PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), sehingga dapat diketahui bahwa program PBB ini benar-benar memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat kelurahan, dan penelitian ini berupaya menginterpretasikan secara lebih mendalam dan mendekati kenyataan yang sebenarnya sehingga hasilnya lebih empiris.

1. 6. Kerangka Pemikiran

Peranan Sosial (Lurah)

Menurut Soerjono Seokanto (1989:212) Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuain diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut :

a. Peranan meliputi norma-norma yang duhubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Lembaga-lembaga merupakan bagian dari msayarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk melaksanakan peranan. Kadang-kadang perubahan stuktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas bertambah. Akan tetapi juga dapat mengurangi peluang-peluang apabila terpaksa diadakan rasionalisasi sebagai akibat perubahan struktur organisasi.

Sejalan dengan adanya *status-conflict*, juga ada *conflict of roles*. Bahkan kadang-kadang suatu pemisahan antara individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakannya. Hal ini dinamakan *role distance*. Gejala tadi timbul apabila individu merasakan dirinya tertekan karena dia merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan masyarakat kepadanya. Dengan demikian, dia tidak melaksanakan peranannya dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan dirinya, apabila dia berada dalam lingkaran sosial yang berbeda. Lingkaran sosial atau *social circle* adalah kelompok sosial dimana seseorang mendapat tempat serta kesempatan untuk melaksanakan peranannya. Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksnakan peranan tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang

diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak. Apabila tidak dapat terpenuhi oleh individu maka terjadilah role distance.

Pembahasan perilal aneka macam-macam peranan yang menyangkut pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal berikut :

a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
b. Peranan tersebut seyogyanya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut[3].

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Lurah telah berpedoman kepada Perda Nomor 18 Tahun 2001 tentang orgasisasi dan tata kerja Kelurahan yang kemudian di ganti dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 24 Tahun 2010 yang berisi tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan uraian tugas Kelurahan.

Mengenai tugas pokok dan fungsi lurah (TUPOKSI) sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 24 Tahun 2010 sebagai berikut :

---

[3] Soerjono Soekanto. 1989. *Sosiologi : suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali. hal 212

Struktur Otoritas Legal Rasional

Struktur otoritas ini tumbuh dari legitimasi sistem rasional-legal. Dalam struktur otoritas ini, Weber memfokuskan pada bentuk struktur berupa birokrasi. Yang mana birokrasi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan gabungan dari bagian-bagian resmi yang memiliki fungsi resmi *(badan) dan terikat oleh suatu aturan tertentu.*
2. Setiap bagian memiliki ruang lingkup kompetensi yang spesifik. Badan tersebut membawa serta serangkaian kewajiban untuk melakukan berbagai fungsi, otoritas untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut dan cara-cara pemaksaan yang diperlukan bagi dilakukannya pekerjaan tersebut.
3. *Bagian-bagian tersebut terorganisasi kedalam sebuah sistem hierarki.*
4. Dalam bagian-bagian tersebut terdapat suatu kualifikasi (syarat) teknis yang harus dipenuhi oleh individu yang akan masuk kedalamnya (menjadi staf didalamnya).
5. Sarana produksi tidak dimiliki oleh staf. Staf hanya memanfaatkan sarana *tersebut untuk melakukan pekerjaannya.*
6. Pegawai tidak diizinkan mengubah posisi, ia tetap menjadi bagian dari organisasi
7. Tindakan, keputusan, dan aturan administratif dirumuskan & dirancang secara tertulis

Weber mengungkapkan berbagai keterbatasan organisasi birokratis. Sebagai contoh ia menyadari "pita merah" yang sering kali menjadikan urusan-urusan birokrasi begitu rumit dan sulit. Ketakutan terbesarnya adalah bahwa rasionalisasi yang mendominasi seluruh aspek kehidupan birokratis menjadi ancaman bagi kebebasan individu. Sebagaimana dikemukakan Weber : "*Tidak ada satu satu mesin pun di dunia ini yang berfungsi sama persis dengan beratus manusia dan terlebih lagi, begitu murah kalkulasi rasional, mereduksi setiap pekerja sekrup dan mesin birokrasi dan, dia melihat dirinya menjadi sekrup yang*

lebih besar. Hasrat birokratisasi membawa kita ke situasi putus asa. (Weber, 1921/1968: liii)[5]

Partisipasi Masyarakat

Masyarakat suatu kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian yang integral yang penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut yang ditinjau dari segi organisasi bahwa pemerintah daerah merupakan organisasi yang bersistem terbuka. Menurut Katz dan Kahn, organisasi seperti ini ditandai oleh adanya impor energi dari lingkungannya agar dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Tanpa adanya impor energi, suatu organisasi sistem terbuka tidak dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat difungsikan sebagai substitusi energi pusat dan sebagai energi alternatif bagi daerah. sehingga secara bertahap dapat melepaskan diri dari ketergantungannya pada pusat.

Salah satu wujud dan rasa tanggung jawab masyarakatnya di atas adalah adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam penyelengaraan otonomi daerah.

---

[5] George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2008. *Teori sosiologi*. Yogyakarta : Kreasi Wacana. hal 139

Di samping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan etika politik yang menempatkan rakyat sebagai kekuasaan dan kedaulatan. Bagi setiap negara demokratis, bagaimanapun akan melibatkan warganya dalam proses politik yang berlangsung. Hal ini setidak-tidaknya didasarkan pada pertimbangan :

- Jika kita setuju bahwa aturan main politik yang memberi kesempatan pada "yang diperintah" untuk menentukan siapa "yang memerintah" dan untuk mempengaruhi tingkah lakunya dalam memerintah adalah aturan main politik yang menghormati harkat manusia dan jika kita setuju bahwa penghormatan dan peningkatan harkat manusia adalah inti masalah kualitas manusia, maka pembahasan peran-peran masyarakat cukup gayuh.
- Kenyataan bahwa setiap pemerintah, dimana pun saja, apa pun corak ideologinya dan bagaimanapun otoriternya tidak bisa mengabaikan begitu saja soal pemberian saluran bagi peran serta masyarakatnya.
- Terutama sekali, pemerintah yang sedang menjalankan pembangunan ekonomi secara cepat, demi kepentingannya sendiri harus memperhatikan masalah perwakilan kepentingan peran serta masyarakat.

Di samping itu, adanya partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan (Miriam Budiardjo) :

> "bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya".

Ini berarti konsepsi partisipasi terkait secara langsung dengan ide demokrasi, di mana dasar prinsip demokrasi "dari, oleh dan untuk rakyat", akan :

> "memberikan pada setiap warga negara kemungkinan untuk menaiki jenjang atas skala sosial dengan demikian menurut hukum membuka

jalan bagi hak-hak masyarakat untuk meniadakan semua hak istimewa yang dibawa sejak lahir, serta menginginkan agar perjuangan demi keunggulan dalam masyarakat ditentukan semata-mata oleh kemampuan seseorang" atau dengan kata lain, prinsip ini bertujuan "untuk menjamin pengaruh dan partisipasi yang sama dalam mengatur kepentingan bersama bagi semuanya".

Prinsip inilah yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia seperti yang secara jelas tercermin dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dan karena daerah merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari sistem politik nasional, harus juga dilandasi oleh prinsip di atas. Atau dengan perkataan lain partisipasi masyarakat merupakan bagian inherent dalam setiap penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan, partisipasi masyarakat memainkan peranan penting, bahkan Bintoro Tjokroamidjojo : 1981 menegaskan :

> "Pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi, dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negara".

Sementara itu Katz : 1965 menempatkan partisipasi sebagai salah satu faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan, di samping faktor-faktor tenaga terlatih, biaya, informasi, peralatan dan kewenangan yang sah. Dengan demikian dari sudut ini, keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sebagi bagian integral dari sistem pembangunan nasional, terutama diukur dari derajat keterlibatan warganya dalam penyelenggaraan otonomi tersebut. Penyelenggaraan otonomi daerah tanpa partisipasi masyarakat tidak dapat disebut berhasil, sekalipun mungkin daerah tersebut telah mandiri.

Masyarakat sendiri dapat berpartisipasi pada beberapa tahap, terutama dalam pembangunan, yakni pada tahap inisiasi, legitimasi, dan eksekusi atau

dengan kata lain, pada tahap decision making, implementation, benefit dan tahap evaluation atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo :

> "Pertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan. Kedua, adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi empat jenjang, diantaranya :

1. *Partisipasi dalam Proses Pembuatan Keputusan*

   Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijakasanaan. Dalam rumusan yang lain adalah menyangkut pembuatan keputusan politik. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali, terutama pada "keputusan politik" yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan. Dalam hal ini Moebyarto : 1984 menegaskan, "dalam keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat untuk membuat "putusan politik" yang menyangkut nasib mereka, adalah ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan untuk menentuka nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. *Partisipasi dalam Pelaksanaan*

   Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari tahap pertama. Dalam hal ini Uphoff menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

3. *Partisipasi dalam Memanfaatkan Hasil*

Setiap usaha bersama manusia-pembangunan, misalnya bagaimanapun ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama anggota masyarakatnya. Oleh sebab itu, anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada. Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, rakyat/masyarakat daerah harus pula menikmati hasilnya secara adil.

Adil dalam pengertian disini adalah setiap orang mendapatkan bagiannya sesuai dengan pengorbanannya dan menurut norma-norma yang umum diterima. Sedangkan norma-norma yang dapat dijadikan ukuran dapat berupa norma hukum (peraturan perundang-undangan). ataupn berupa nilai-nilai etika dan moral keagamaan.

Menurut Uphoff dkk., partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya *(material benefit),* manfaat sosialnya *(social benefit),* dan manfaat pribadi *(personal benefit).*

4. *Partisipasi dalam Evaluasi*

Sudah umum disepakati bahwa setiap penyelenggaraan apapun dalam kehidupan bersama, hanya dapat dinilai berhasil apabila dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk mengetahui hal ini, sudah sepantasnya masyarakat diberi kesempatan menilai hasil yang telah diacapai. Demikian pula dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat dapat dijadikan sebagai "hakim" yang adil dan jujur dalam menilai hasil yang ada.

Sikap ikut memelihara dan melestarikan hasil yang telah dicapai, dapat dilihat sebagai indikasi adanya dukungan positif anggota masyarakat terhadap apa yang dihasilkan. Karenanya mudah diperkirakan hal tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya sikap apatisme dan tak adanya perasaan ikut memiliki, merupakan indikasi bahwa apa yang diselenggarakan belum sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dan ini tentunya berguna sekali dalam penyusunan kegiatan berikutnya.

Sekalipun partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintah daerah merupakan unsur esensial yang melekat dalam penyelenggaraan itu sendiri, tapi tidak berarti setiap orang dapat berpartisipas dengan intensitas dan kapasitas yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan, perbedaan kepentingan dan perbedaan keahlian antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya.

Oleh sebab itu, perlu ditegaskan bahwa dalam pasrtisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya, misalnya keahliannya, kepentingan (masalahnya), ataupun tingkat kemampuannya atau dengan kata lain, seseorang dapat berpartisipasi secara parsial, dalam pengertian hanya dalam terlibat dalam salah satu atau beberapa aktivitas saja atau partisipasi secara prosesial, dalam pengertian dapat terlibat dala semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas. Demikian pula dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari keseluruhan pembahasan diatas dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat daerah pertama-tama dapat difungsikan sebagai substitusi energi bagi daerah-daerah yang selama ini mengandalkan pusat sebagai sumber energinya. Kedua, adanya partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari keterikatan dan komitmen kita sebagai bangsa terhadap nilai-nilai demokrasi dan etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan. Ketiga, secara rasional keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional ditentukan oleh ada tidaknya partisipasi warganya. Terakhir, partisipasi masyarakat salah satu tolak ukur mendasar yang paling logis dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. [6]

Program PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas

[6] Kaho, Josef Riwu. 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

bumi dan bangunan yang meliputi antara lain pemilik, penghuni pengontrak, penggarap dan penyewa. Dengan demikian, subjek pajak tersebut menjadi wajib pajak bumi dan bangunan.

Secara lengkap dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :

a) Undang-undang No.12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.12 tahun 1994.
b) Pemerintah No.46 tahun 1985 tentang persentase nilai jual kena pajak untuk pajak bumi dan bangunan.
c) Keputusan menteri keuangan No.1002 KMK.04 tentang tata cara pendaftaran objek PBB.
d) Keputusan menteri keuangan tentang penagihan PBB dan penunjukkan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa.
e) Keputuasan menteri keuangan No.1007 KMK.04 1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan kepada Gubernur Kepala Daearah Tingkat I atau Bupati, Waikota Madya Daerah Tingkat II.
f) Keputusan menteri keuangan No 523 KMK.04 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya nilai objek sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan.
g) Keputusan menteri keuangan no.201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan. [7]

[7] Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdyah Palembang : hal 228

Bagan Kerangka Pemikiran

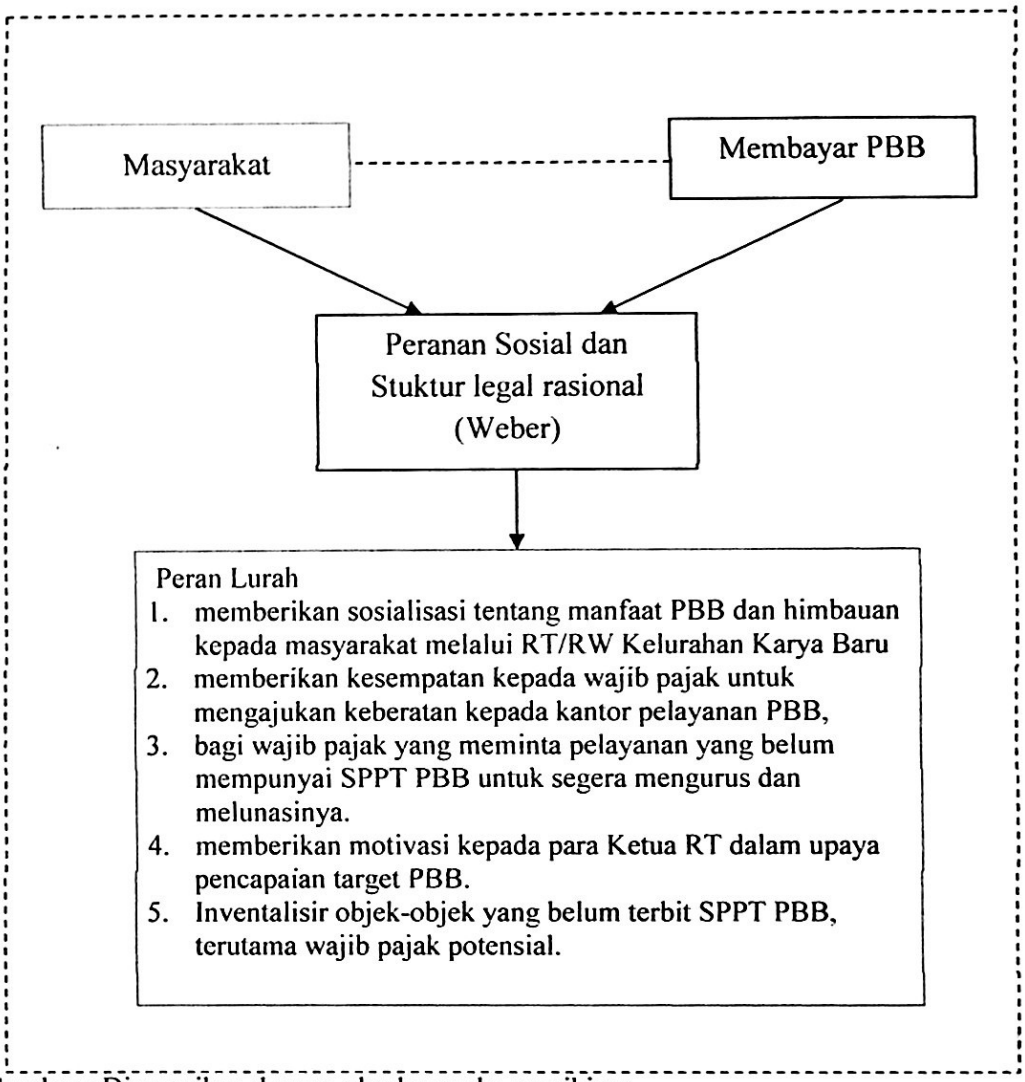

Sumber : Disesuaikan dengan alur kerangka pemikiran

Keterangan :

---------- : batasan ruang lingkup kajian

——————→ : struktur berfikir / sistematika berfikir

Sumber : disesuaikan dengan alur kerangka pemikiran

Berdasarkan bagan diatas dapat dijelaskan secara singkat bahwa Peran lurah merupakan seseorang yang mengatur subsistem kabupaten/kota yang merupakan pelaksana pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang paling

bersentuhan dengan rakyat. Salah satu contoh Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar yang merupakan bagian pemerintahan yang relatif baru untuk itu masih banyak sistem pembangunan yang harus dilakukan lurah terutama dalam program PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), akan tetapi program ini tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya peran lurah secara aktif yang dalam hal ini difokuskan pada peran lurah serta partisipasi masyarakat sehingga outputnya didapatkan hasil mengenai bagaimana peran lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PBB di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka jenis metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Bogdan dan Taylor[8] mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghadirkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bersifat deskriptif yang berusaha untuk menemukan fakta serta memberikan gambaran suatu pengalaman atau peristiwa dari kehidupan masyarakat, yang dalam hal ini adalah peranan lurah yang mendorong partisipasi masyarakat pada program PBB sehingga peranan sosial yang di pegang Lurah akan tergambar dalam situasi yang wajar.

---

[8] Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998) hlm.4

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang di ambil dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan pengamatan yang telah peneliti lakukan, diketahui bahwa lokasi penelitian ini termasuk kelurahan Karya Baru merupakan kawasan yang sedang berkembang terutama dibidang pemukiman, industri, perdagangan dan jasa. Kelurahan ini sangat strategis sebagai kawasan transit yang di apit oleh dua jalan utama yaitu jalan Kolonel H. Barlian disebelah timur dan Jalan Soekarno Hatta disebelah barat. Tidak mengerankan jika diwilayah ini cukup banyak didirikan bangunan tempat tinggal berupa perumahan-perumahan oleh perusahaan-perusahaan pengembang dan demikian juga pada sektor usaha lainnya.

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena berdasarkan observasi awal di Kelurahan ini :

1. Peran Lurah dalam program PBB di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar aktif sejak tahun 2011.
2. Adanya keterlibaran lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PBB di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui Peran Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat pada program PBB di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar.

1.7.3 Batasan Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini yaitu:

a) Peranan Lurah

Peranan Lurah merupakan peranan sosial yang dipegang oleh Lurah. Dalam hal ini Lurah bertanggung jawab menjaga dan memotivasi masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku, selain itu peranan Lurah berpengaruh baik dalam kehidupan pemerintahan maupun kemasyarakatan. Lurah sebagai pemimpin resmi diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjalankan berbagai program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam program pembangunan, lurah dapat memberikan dorongan bagi warganya agar mau melaksanakan pembangunan yang ditujukan bagi masyarakat itu sendiri. Peranan Lurah diantaranya :

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
b. Pembinaan program pemberdayaan kelurahan
c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat
d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
g. Evaluasi dan pelaporan.

b) Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (dalam sacafirmansyah, 2009) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi

masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

c) Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

1.7.4 Unit Analisis Data

Unit penelitian adalah unit yang akan diteliti dan dianalisis. Sedangkan menurut Suharsini Arikunto, unit analisis adalah satuan-satuan yang menunjuk pada subjek penelitian unit atau kesatuan yang menjadi sasaran dalam penelitian. Berdasarkan pengertian mengenai unit analisis, maka unit analisis penelitian ini adalah individu, dalam hal ini adalah Lurah Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar.

1.7.5 Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 1999 : 90). Teknik yang digunakan untuk menentukan informasi kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi, dilakukan secara sengaja yaitu (*purposive*)

sesuai dengan fokus penelitian (Bungin 2003 :53). Jadi penentuan informan dalam penelitian ini digunakan secara *purposive* yang ditetapkan menjadi 10 informan secara sengaja dengan kriteria tertentu, adapun kriteria untuk menentukan informan adalah:

1) *Lurah (LS)*
2) Staf Kelurahan (NM, XL, PR,PM, ZS)
3) Masyarakat (JW, WS, AX, RR)

1.7.6 Data dan Sumber Data

Menurut Lofland (1994) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2001 : 112)

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, antara lain :

1) Data Primer

   Data primer adalah data utama yang berupa kata-kata dan tindakan serta keterangan-keterangan yang berhasil dikumpulkan dari subjek penelitian. Data primer dalan penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi dari beberapa informan. Hasil wawancara mendalam dan observasi tersebut dipergunakan untuk menggali informasi atau data tentang apa saja yang melatarbelakangi peranan lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Karya Baru Kelurahan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pelaksanaan penelitian dan diperoleh dari pemanfaatan sumber-sumber tertulis seperti : buku keterangan dari sumber pendukung, artikel majalah dan laporan-laporan penelitian yang relevan.

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian Peranan Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang adalah sebagai berikut :

a. Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Menurut Moleong[9], wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini digunakan untuk mengungkap peranan lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat pada program PBB di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada informan.

[9] Moleong,.*Ibid*,. hlm. 135

b. Observasi Terfokus

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terfokus. Dalam penelitian ini menggunakan peneliti menggunakan observasi terfokus karena observas ini dilakukan dengan melihat langsung kelapangan bagaimana peranan lurah dalam mendorong partisipasi masyarakatnya dalam program PBB di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini , pada penelitian ini mengungkap sejumlah fakta-fakta data sosial yang tersimpan, misalnya seperti konvensi yaitu kebiasaan–kebiasaan yang terkait, buku-buku tentang kepemimpinan formal, artikel, skripsi dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

1.7.8 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen[10], analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.

Unit analisis penelitian ini adalah peranan lurah. Interpretasi data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Sifat analisis deskriptif kualitatif bukan untuk menggeneralisasikan dari data yang didapat, tetapi hanya untuk

[10] Husnaini,.*ibid.*,hlm.32

menggambarkan varian-varian dalam kerangka holistik dari realitas sosial mengenai peranan lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat pada program PBB di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang. Ketika di lapangan, peneliti melakukan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan dari data yang ada kemudian dikelompok-kelompokkan.

Teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Habermas melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian, dan kesimpulan[11].

1. Reduksi Data

Peneliti pada tahap ini memusatkan perhatian pada data lapangan yang telah terkumpul, yaitu hasil dokumentasi yang diperoleh di lapangan serta data hasil wawancara mendalam kepada informan. Data di lapangan tersebut selanjutnya dipilih dalam arti kata menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian. Data yang cocok dengan maksud penelitian yang akan peneliti ambil, yakni tentang proses pelaksanaan dari program PBB di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar melalui analisis persektif struktur legal rasional.

Data yang dipilih sesuai dengan pertanyaan penelitian akan disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan kemudian peneliti melakukan abstraksi data menjadi data uraian singkat.

---

[11] Bungin, *Ibid.* hlm 229

2. Display Data

Peneliti pada tahap ini melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu, artinya data mengenai program PBB di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar. Uraian-uraian singkat yang diperoleh dari data tersebut disajikan ke dalam sebuah tulisan cerita dengan menggunakan kerangka pemikiran yang telah ada. Di sini peneliti mendeskripsikan proses pelaksanaan peranan lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat pada program PBB di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang melalui analisis perspektif struktur legal rasional. Pendeskripsian tersebut disajikan dalam sebuah cerita dalam sebuah tema mengenai analisis perspektif struktur legal rasional terhadap peranan lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat pada program PBB di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang.

3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Penelitian pada tahap ini selalu melakukan uji kebenaran dengan teori yang digunakan pada setiap makna yang muncul dari data mengenai analisis perspektif struktur legal rasional terhadap peranan lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat pada program PBB di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang.

1.7.9 Teknik Triangulasi Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan suatu teknik pemeriksaan data yang akurat. Teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah teknik

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan kata lain bahwa dengan teknik triangulasi, peneliti dapat me-*recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori[12].

Menurut Patton[13] teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

---

[12] Moleong, *Ibid,*. hlm.178
[13] Moleong, *Loc,.cit*